

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beragamnya suku bangsa dan bahasa dalam suatu ikatan semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadikan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat majemuk, mulai dari Sabang sampai Marauke. Majemuknya bangsa Indonesia bisa terlihat dari banyaknya pulau dan bahasa yang di pakai oleh berbagai suku. Lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dan dihuni oleh banyak sekali kelompok suku yang menggunakan tidak kurang dari 300 jenis bahasa lokal atau dialek dalam bahasa sehari-hari (Susetyo, 2010: 1). Data terakhir yang ada pada tahun 2010, jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia telah mencapai 1.340 suku bangsa. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki pertumbuhan cukup pesat adalah Provinsi Papua. Bahkan menurut Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat terhitung per 13 Maret 2012, jumlah keseluruhan penduduk baik Provinsi Papua dan Papua Barat telah mencapai 5.703.998 jiwa. Akan tetapi jumlah tersebut akan berubah kecil bahkan menjadi suatu kelompok minoritas ketika masuk dalam ranah lokalitas daerah di luar Provinsi Papua (<http://www.up4b.go.id>, diakses pada 9 Juni 2014 jam 14.25).

Berbagai budaya yang melimpah di Indonesia merupakan suatu keistimewaan tersendiri. Kebudayaan merupakan suatu pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang tertanam yang mereka terima secara sadar atau tanpa dipikirkan yang

semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Liliweri, 2002: 6).

Keanekaragaman masyarakat (masyarakat majemuk) adalah hal yang sangat dihargai di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam kebudayaan, suku, etnis dan agama. Wilodati (2012) secara jelas menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia dari berbagai sisi: *Pertama*, hubungan kekerabatan, hubungan kekerabatan ini merujuk pada ikatan dasar hubungan darah (keturunan) yang dapat ditelusuri berdasarkan garis keturunan ayah, ibu atau keduanya. *Kedua*, ras dapat dibedakan dengan ciri-ciri fisik orang lain (rambut, kulit dan bentuk muka). *Ketiga*, daerah asal merupakan tempat asal orang lahir yang akan memberikan ciri tertentu apabila yang bersangkutan berada di tempat lain seperti dialek yang digunakan, anggota organisasi yang bersifat kedaerahan serta prilaku. *Keempat*, menggunakan bahasa sukunya masing-masing. *Kelima*, agama yang dianut Indonesia yang berbeda-beda.

Keberhasilan komunikasi antarbudaya dapat dijelaskan dalam prespektif *The 5 Invetable Laws of Effective Communication* (Lima Hukum Komunikasi Efektif) meliputi: *Respect, Empathy, Audible, Clarity, dan Humble* disingkat *REACH*. Hal ini relevan dengan prinsip komunikasi sosial budaya yaitu sebagai upaya meraih perhatian, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, maupun respon positif dari orang lain (Suranto, 2010:194).

Walaupun negara telah membuat suatu pasal yang berfungsi melindungi warga negaranya, dalam kenyataannya, masih banyak terjadi konflik-konflik

diskriminasi bahkan kriminalitas yang bertemakan Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA). Banyaknya suku di negara Indonesia menjadikan sebagian besar masyarakat sangat sulit untuk memahami karakteristik dari masing masing suku secara mendetail dan terperinci.

Masyarakat majemuk yang hidup bersama dalam satu wilayah terdiri dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda tentunya sangat rentan dengan konflik antar kelompok. Konflik kelompok di Indonesia, seperti konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) sudah menjadi konsekuensi dalam hidup bermasyarakat majemuk, karena hal tersebut bisa terjadi kapan saja dengan membawa identitas kelompok. Konflik SARA biasanya terjadi ketika antar kelompok tidak dapat saling memahami budaya masing-masing dan merasa budayanyalah yang lebih unggul dibanding yang lain (etnosentrisme). Konsep etnosentrisme seringkali dipakai secara bersamaan dengan rasisme. Akibat ideologi ini maka setiap etnik atau ras akan memiliki sikap etnosentrisme atau rasisme yang tinggi.

Keberhasilan komunikasi antarbudaya juga sangat diperlukan bagi masyarakat yang mendiami kota-kota besar di Indonesia. Tingginya tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota, ketergantungan ekonomi dan mobilitas antar negara menjadikan kota sebagai tempat yang didiami berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Kesalahpahaman antarbudaya yang ditimbulkan oleh stereotip bisa saja terjadi dalam hidup bermasyarakat di kota-kota besar jika anggota masyarakat tidak dapat memahami satu sama lain mengenai budaya kelompok lain.

Salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, agama, dan etnis adalah kota Yogyakarta, baik dari penduduk pendatang yang tinggal sementara maupun penduduk pendatang dan pribumi yang menetap di Yogyakarta. Mengapa demikian, karena seperti yang kita semua tahu bahwa Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang membuat semakin deras arus multikulturalisme yang ada di Yogyakarta. Dari tahun-ketahun banyak para pemuda-pemudi yang berdatangan untuk menempuh pendidikan dari berbagai macam daerah, pulau, suku, agama, budaya yang bertumpuk menjadi satu, membuat keanekaragaman SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) menjadi satu di Yogyakarta.

Fakta yang ada akibat adanya berbagai macam etnis, suku, dan budaya di Yogyakarta yaitu adanya keributan yang terjadi dikawasan Seturan, Babarsari, Depok Timur pada 3 Juli 2012, keributan yang terjadi yang diakibatkan oleh masalah *sepele*.

“Kerusuhan pecah di kawasan kampus dan mahasiswa ini ketika sekelompok massa mengamuk, merusak puluhan rumah, membakar sepeda motor, dan menghancurkan sebuah mobil. Kerusuhan meledak akibat kesalah pahaman terkait pungutan parkir kendaraan. Aksi kekerasan melibatkan ratusan mahasiswa dan warga dari kawasan timur Indonesia berlangsung dari tengah malam hingga menjelang subuh” (<https://tribunnews.com/keributan-pecah-di-kawasan-babarsari-003808933.html>, diakses pada tanggal 13 Juni 2014).

Pada kamis 13 Desember 2012, Polisi menangkap salah seorang biang kerusuhan yang sering terjadi di daerah Babarsari, Caturtunggal, Depok Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang melibatkan banyak orang. Baik masyarakat sekitar maupun mahasiswa asal Indonesia bagian timur.

Kerusuhan ini kerap mengakibatkan warga terluka dan rumah-rumah penduduk rusak.

“Kepolisian Sektor Depok Barat, Komisaris Wachyu Tri Budi Sulistiyono mengungkapkan bahwa pihak kepolisian telah menangkap biang kasus kerusuhan yang terjadi di Babarsari. Polisi sebenarnya mengejar kasus perampokan dan penyekapan. Tetapi ternyata pelaku itu merupakan salah seorang yang sering terlibat keributan, pertengkaran, dan tindak kekerasan disertai pembacokan. Komisaris Wachyu Tri Budi Sulistiyono menambahkan bahwa sang pelaku adalah warga Nusa Tenggara Timur dan warga Papua yang sedang menempuh pendidikan disalah satu universitas swasta di DIY”

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/13/058447985/Polisi-Tangkap-Penggerak-Kerusuhan-Babarsari>, diakses pada tanggal 13 Juni 2014).

Data terbaru adalah pada 7 Mei 2013 Polres Sleman, Yogyakarta, menetapkan dua tersangka penganiayaan dua anggota TNI yang diduga dianiaya oleh beberapa warga ataupun mahasiswa asal Papua yang tinggal di Yogyakarta.

“Kepala Kepolisian Resor Sleman, Ajun Komisaris Besar Hery Sutrisman mengungkapkan Kedua tersangka adalah Kristian Balla Tagihuma, 25 tahun dan Frans Adi, 22 tahun. Dua orang lainnya yang sempat ditahan: Bobi Soa, 22 tahun dan Stenly Pekey, 23 tahun, dibebaskan kemarin siang. Dua lainnya memang berada di lokasi, tapi tidak melakukan apa-apa, Selasa 7 Mei 2013. Kristian dan Frans diduga menganiaya dua anggota Batalyon Infanteri 403/Wirasada Pratista yang bermarkas di Jalan Kaliurang Kilometer 6, Sleman, Minggu 5 Mei 2013. Beberapa tahun lalu, asrama mahasiswa Papua itu berada di dalam kompleks Taman Kencana. Karena mereka sering menimbulkan keributan, warga kompleks meminta mereka pindah. “Jika mabuk, sering sekali terjadi keributan,” ujar Eko. Menurut dia, mahasiswa Papua mudah emosional. “Sering terlihat warga Papua dari asrama itu yang keluar membawa tombak dan panah. Warga sempat khawatir,” katanya. Tapi sudah beberapa waktu tak ada lagi keributan. Benny Dimara, sesepuh warga Papua di Yogyakarta menjelaskan, ada 19 paguyuban warga Papua di Yogyakarta. Mereka tinggal di 16 asrama. Pengurus paguyuban bertugas mengawasi mereka. “Kami mengajak mahasiswa Papua berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat. Juga kadang ronda malam,” kata dia. Ada sekitar 6.000 mahasiswa asal Papua yang kuliah di Yogyakarta. Tiap Ahad digelar kebaktian di asrama maupun ikut kebaktian di gereja. “Mereka kami beri pengertian. Tugas mereka di sini kuliah dan sering beribadah,” kata Benny” (<http://www.tempo.co/read/news/2013/05/07/058478722/Dua->

Mahasiswa-Papua-di-Yogya-Jadi-Tersangka, diakses pada tanggal 1 Agustus 2014).

Yogyakarta yang dikenal sebagai kota yang ramah dan bersahabat dalam beberapa tahun terakhir mungkin telah memiliki *image* yang kurang baik dimata para pengunjung atau wisatawan terutama para mahasiswa-mahasiswi dari luar Yogyakarta yang mengharapkan ketenangan dan kedamaian mereka dalam menempuh pendidikan di Yogyakarta. Terlalu sering konflik antar etnis, suku, antara masyarakat lokal dan pendatang yang terjadi di Yogyakarta dan hal itu justru kebanyakan dilakukan oleh sebagian mahasiswa dari wilayah Indonesia bagian Timur. Permasalahan ini terjadi akibat adanya stereotip yang ada pada masyarakat lokal terutama di wilayah Babarsari, seperti apa yang telah diungkapkan diatas, konflik-konflik yang ada selalu melibatkan masyarakat lokal dan pendatang dari wilayah Timur.

Suku Papua yang tinggal di Yogyakarta tentunya menjadi kelompok minoritas yang membuat stereotip, prasangka dan diskriminasi warga pribumi terhadap masyarakat pendatang dari papua menjadi negatif dan beranggapan bahwa pembuat keributan yang ada di Yogyakarta merupakan orang Papua. Pada kenyataannya tidak hanya orang Papua yang membuat keributan pada kasus kerusuhan di Babarsari tersebut. Kekayaan budaya di Indonesia ini justru akan menjadi sebuah boomerang, dimana orang saling menghancurkan satu sama lain dengan mengatasnamakan perbedaan kelompok, yang akan menjadi malapetaka jika tidak dipelihara dan dijalin suatu kerukunan antar suku di Indonesia. Kegagalan mengelola kemajemukan akan menjadi musibah kemanusiaan yang akan menghancurkan integrasi bangsa (Susetyo, 2010: 3).

Dengan berkomunikasi dengan beda budaya pada awalnya akan melalui proses adaptasi dengan budaya baru tersebut. Untuk itu proses komunikasi antarbudaya yang baik sangat diperlukan, kemudian secara alami proses akulturasi terjadi pada suku pendatang, kesadaran individu untuk menerima dan bersikap terbuka dengan lingkungan baru. Proses penyesuaian dengan budaya baru memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dalam prosesnya penyesuaian diri dengan budaya baru tidak selalu berhasil dalam sebuah proses komunikasi yang dilakukan. Dengan mengacu mengenai beberapa kasus di atas dan proses komunikasi antarbudaya tersebut, sangat menarik untuk kita kaji tentang bagaimana sebenarnya stereotip dan prasangka yang berkembang terhadap masyarakat pendatang suku Papua yang berada pada wilayah Tambakbayan IX, Babarsari, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Menarik untuk dibahas, karena pada dasarnya setiap kelompok ataupun komunitas memiliki stereotip dan prasangka yang berbeda terhadap kelompok maupun individu lainnya, dan tentu saja pada konteks ini akan dilihat seberapa besar dan seperti apa stereotip dan prasangka yang berkembang terhadap suku Papua yang ada di Yogyakarta, sehingga menimbulkan pertanyaan sebagai berikut:

“Bagaimana stereotip dan prasangka yang berkembang pada suku Jawa terhadap suku Papua yang ada di wilayah Babarsari Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh gambaran bagaimana stereotip dan prasangka yang berkembang terhadap suku Papua di wilayah Tambakbayan IX, Babarsari Yogyakarta.
2. Untuk mendapatkan temuan-temuan menarik tentang bagaimana stereotip dan prasangka yang berkembang terhadap suku Papua di wilayah Tambakbayan IX, Babarsari Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, kajian, dan referensi mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya pada kajian stereotip dan prasangka.

2. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para peneliti lanjutan yang akan melakukan penelitian tentang stereotip dan prasangka agar mendapatkan hasil penelitian yang sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teori

Seperti apa yang telah dikatakan West dan Turner (2008 : 50-51) bahwa *pertama*, Teori dalam arti luas atau juga disebut sebagai *grand theory*, karena disini terdapat terlalu banyak kasus dimana teori komunikasi berbeda dari satu kelompok dan kelompok lainnya atau disaat perilaku komunikasi dibuat dan dimodifikasi oleh suatu perubahan dalam konteks dan waktu. *Kedua*, teori dalam arti menengah (*mid-range theory*), yang ditujukan untuk menjelaskan suatu

perilaku dari sekelompok orang dan bukan semua orang, seperti yang berusaha dilakukan oleh *grand theory*, dan hal ini juga tidak dapat menjelaskan perilaku semua orang berdasarkan konteks dan waktu tertentu. Teori dalam kelas menengah ini menjelaskan sebuah fokus pada konteks perilaku komunikasi. Teori-teori ini dibatasi oleh pertimbangan seperti konteks, waktu, dan perilaku komunikasi. *Ketiga*, teori sempit (*narrow theory*), dimana lebih menekankan pada orang-orang tertentu pada situasi yang tertentu, seperti aturan-aturan komunikasi yang relevan.

Untuk dapat memahami sebuah teori, kita juga harus dapat memahami satu komponen teori. West dan Turner (2008 : 52) mengungkapkan bahwa teori terdiri dari beberapa bagian pokok, dua bagian yang terpenting adalah konsep dan hubungan. Konsep (*concept*) adalah “kata-kata yang memberikan label elemen yang paling penting yang terdapat di dalam sebuah teori”. Berikutnya adalah hubungan (*relationships*) yang merupakan cara-cara di mana konsep-konsep dalam sebuah teori dikombinasikan.

1. Stereotip

Stereotip merupakan salah satu mekanisme penyederhana untuk mengendalikan lingkungan, karena keadaan lingkungan yang sebenarnya terlalu luas, terlalu majemuk, dan bergerak terlalu cepat untuk bisa dikenali dengan segera. Gambaran tentang keadaan lingkungan itulah yang menentukan apa yang seseorang lakukan. Dengan demikian, tindakan-tindakan seseorang tidaklah didasarkan pada pengenalan langsung terhadap keadaan lingkungan sebenarnya,

namun berdasarkan gambaran yang dibuatnya sendiri atau yang diberikan kepadanya oleh orang lain.

Setidaknya terdapat tiga prinsip yang berguna dalam melihat dan mengidentifikasi stereotip, seperti yang dikemukakan oleh McGarty, yaitu: (a) *stereotypes are aids to explanation*, (b) *stereotypes are energy-saving devices*, and (c) *stereotypes are shared group beliefs* (McGarty, Yzerbyt dan Spears, 2004:2). Secara singkat, prinsip pertama menyiratkan bahwa stereotip yang terbentuk membantu seseorang dalam memahami atau menjelaskan suatu kondisi tertentu, sedangkan prinsip yang kedua menyiratkan bahwa stereotip membantu individu dalam usaha seseorang dalam memahami sesuatu, dan yang ketiga menyiratkan bahwa stereotip terbentuk sesuai dengan penerimaan pandangan atau norma-norma dari kelompok sosial yang dimiliki seseorang.

1.1. Tingkatan Stereotip

Dalam pembentukan stereotip, terdapat empat tingkatan, keempat tingkatan tersebut didasarkan pada: pertama, pada sumber atau data yang tersedia sebagai rangsangan di dunia sosial, dan kedua pada pengetahuan dan harapan (dugaan). Empat tingkatan tersebut yaitu: (1) *“Bottom up”*, (2) *A bit of “bottom up”*, (3) *A bit of “top down”*, (4) *Neither up nor down*. Berikut ini penjelasan dari setiap tingkatan pembentukan stereotip :

1.1.1. *Bottom up*

Pada tingkatan ini juga disebut sebagai "*information rich*", yang mempertimbangkan bahwa orang-orang menghasilkan stereotip berasal dari suatu data atau fakta-fakta atas suatu kelompok, atau bisa dikatakan perbedaan diantara kelompok sangat jelas terlihat karena tersedianya banyak informasi atau data sehingga hal tersebut menjadi dasar dari pembentukan stereotip, tanpa membuat atau menggunakan asumsi mengenai perbedaan kelompok.

Pada tingkatan ini bisa dikatakan alasan yang paling langsung berterus terang dari pembentukan stereotip. Ketika stereotip ini menimpa anggota kelompoknya sendiri maka *prinsipself-enhancement* (dimana seseorang untuk lebih menyukai identitas sosial yang positif dari pada yang bersifat negatif.) dan dimensi evaluasi menjadi hal yang lebih penting dalam membentuk stereotip. Prinsip teori identitas sosial yang ketika melihat sesuatu bersifat sama atau sederajat, maka kelompok akan cenderung untuk melihat kelompok mereka sendiri secara positif dalam sebuah arena perbedaan. Dalam tingkatan pembentukan stereotip jenis "*bottom up*" ini, keterangan maupun data-data dari pembelajaran di mana orang-orang dikenalkan dengan beberapa informasi maka menggunakan informasi ini sebagai dasar dari perbedaan stereotip diantara kelompok, khususnya kebaikan di dalam kelompok (McGarty, Yzerbyt dan Spears, 2004: 135).

1.1.2. *A bit of Bottom Up*

Secara umum, *A bit of "bottom up"* dipahami sebagai tingkatan dimana data atau informasi yang dipakai untuk pembeda, pada salah satu atau kedua kelompok, terbatas akan tetapi dapat dipakai sebagai pengambil keputusan sebagai proses pembentukan stereotip. Dengan kata lain, beberapa dasar untuk penggalian stereotip kelompok mungkin saja ditemukan di dalam suatu data yang hampir tidak kelihatan secara jelas atau menjadi kesimpulan dalam suatu perbandingan konteks. Hal ini menunjukkan bahwa data yang sedikit saja sering menjadi pijakan seseorang, dan memungkinkan seseorang untuk melewati data dalam menarik kesimpulan stereotip. Beberapa bentuk stereotip kelompok luar yang tidak diketahui sering kali dihasilkan, pada banyak cara yang sama, dalam membandingkan pengetahuan dari kelompok dalam (*in-group*). Perlu diperhatikan bahwa isi dari stereotip kemungkinan besar di informasikan oleh apa yang seorang ketahui mengenai kelompoknya sendiri, dan secara evaluatif berkemungkinan akan dibedakan dari atribut-atribut pada sesuatu perbandingan yang terkait (McGarty, Yzerbyt dan Spears, 2004: 135 - 144).

1.1.3. *A bit of top down*

Di mana terdapat informasi atau data hanya secukupnya untuk mengkonstruksi atau menduga stereotip dalam suatu konteks yang berkaitan. Maksudnya, stereotip dapat juga dihasilkan dari beberapa bentuk pengetahuan atau dari suatu harapan (bisa disebut "*top down*"), sekalipun dari informasi yang

sangat terbatas seperti latar belakang pengetahuan atau penamaan kategori (McGarty, Yzerbyt dan Spears, 2004: 131).

Seorang yang mempunyai sejumlah pengetahuan dari suatu kelompok memperkenankan stereotip dikonstruksi dalam suatu konteks walaupun orang tersebut hanya mempunyai pengetahuan yang sangat sedikit, bahkan terkadang orang yang berpengetahuan sedikit ini mencoba keluar dari informasi yang diberikan, dan membentuk keterkaitan stereotip kelompok dalam pertanyaan (McGarty, Yzerbyt dan Spears, 2004: 145).

1.1.4. *Neither up nor down*

Spears mengatakan bahwa tingkatan ini juga disebut dengan "*information poor*" dimana tidak terdapat data maupun informasi yang jelas dan nyata mengenai perbedaan diantara kelompok sebagai dasar untuk membedakan (McGarty, Yzerbyt & Spears, 2004: 131). Terdapat pertanyaan pada jenis tingkatan pembentukan stereotip ini, apa yang terjadi ketika suatu kelompok tidak mempunyai dasar yang jelas untuk membedakan kelompok tersebut baik dari segi hubungan harapan stereotip yang sudah ada sebelumnya maupun dalam hal data. Terdapat satu jawaban untuk merespon pertanyaan ini, yaitu terkait dengan prinsip dari kategori diri (*self-categorization*) yang secara sederhana tidak menetapkan suatu dasar untuk perbedaan kategori (baik itu berhubungan dengan *normative fit* maupun *comparative fit*), yaitu menggali sesuatu yang bersifat menonjol dari perbedaan kelompok (McGarty, Yzerbyt & Spears 2004: 150).

2. Minoritas

Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ada mayoritas dan minoritas, baik dari segi bidang agama, ekonomi, moral, politik, budaya, dan masih banyak lagi hal lainnya. Kedudukan kaum minoritas lebih mudah ditindas dan lebih sering mengalami penderitaan karena tekanan oleh pihak mayoritas. Hubungan antara kaum mayoritas-minoritas sering menimbulkan konflik sosial yang ditandai oleh sikap subjektif berupa prasangka dan tingkah laku yang tidak bersahabat. Secara umum, kelompok yang dominan cenderung mempertahankan posisinya yang ada pada saat ini dan menahan proses perubahan sosial yang mungkin akan mengacaukan status tersebut. Ketakutan akan kehilangan kekuasaan mendorong mereka untuk melakukan penindasan dan menyia-nyiakan potensi produktif dari kaum minoritas (Schwingenschlögl dalam Budiman, 2007 : 7-9).

Minoritas sering sekali diartikan sebagai kelompok masyarakat yang mempunyai persamaan identitas berupa fisik ataupun kebudayaan yang tinggal diantara kebudayaan lainnya yang lebih dominan (Will Kymlicka, [Http://www.eints.ee/society/ethnic_minorities2.html](http://www.eints.ee/society/ethnic_minorities2.html), diakses pada 9 Oktober 2014, jam 15.25). Dalam pandangan umum, kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk.

Minoritas sebagai 'kelompok' yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama,

maupun bahasa yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa. Definisi minoritas umumnya hanya menyangkut jumlah. Suatu kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok lain di dalam komunitas.

Dari sudut pandang ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan jumlah anggota. Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi bisa saja suatu kelompok secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas karena kekuasaan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang jumlah anggotanya lebih sedikit, demikian juga prasangka rasial (etnik) lebih intens pada kelompok minoritas daripada kelompok mayoritas karena identitas sosial mereka selalu terancam oleh kelompok mayoritas. Ancaman terhadap etnik minoritas tidak hanya datang dari besarnya kemungkinan menjadi sasaran kekerasan tetapi juga terhadap identitas kultur mereka (Gurr, 1993 : 71-72)

Terdapat beberapa pendapat yang mengungkapkan pengertian minoritas yang diajukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa, yang pertama dikemukakan oleh *UN Special Rappourter*, Francesco Capotorti dalam (Budiman, 2007 : 10),

Capotarti coba menerangkan minoritas sebagai :

“A group, numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non-dominant position, whose members- being nationals of the state- possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their cultural, traditions, religion or language.”

Definisi yang kedua diajukan oleh Jules Deschennes dalam (Budiman, 2007 : 10):

“A group of citizens of a state, constituting a numerical minority and in a non-dominant position in that state, endowed with ethnic, religious or linguistic characteristics which differ from those of the majority of the population, having a sense of solidarity with one another, motivated, if only implicitly, by a collective will to survive and whose aim is to achieve equality with the majority in fact and in law.”

Mengacu pada usulan kedua definisi tentang minoritas di atas, dapat diterjemahkan bahwa minoritas adalah, *pertama* ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar, artinya bahwa sebuah kelompok bisa disebut minoritas jika jumlahnya terlihat jelas lebih kecil dari sisa populasi lainnya di sebuah negara. *Kedua*, hubungannya sangat erat dengan yang pertama, masih berkaitan dengan jumlah ataupun numerik, tetapi kali ini memakai istilah “dominan” dan “tidak dominan”, pada intinya dapat dikatakan walaupun kelompok di suatu wilayah atau negara itu terlihat jelas secara numerik sangat sedikit dibanding dengan yang lain, tetapi kelompok tersebut “dominan” dalam sektor apapun misalnya dalam sektor ekonomi perdagangan, tetap saja tidak bisa disebut sebagai kelompok minoritas. *Ketiga*, menjadi sebuah kelompok minoritas mengharuskan kelompok tersebut untuk memiliki tingkat solidaritas antar sesamanya, dan membagi bersama untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan. Meskipun sekilas tampak

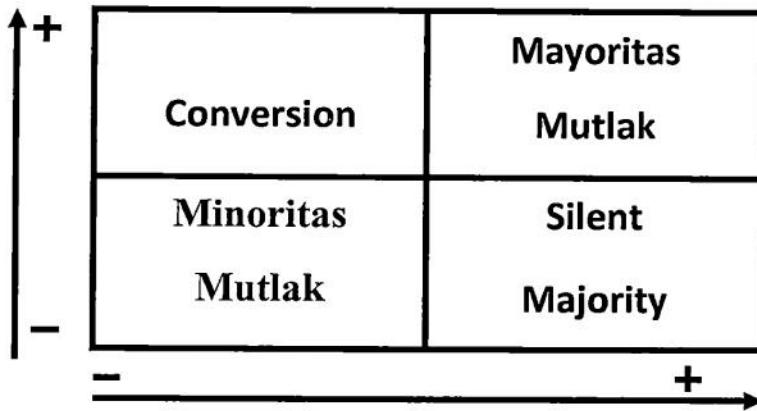
cukup masuk akal, tapi batasan ini menetapkan minoritas menjadi sebuah kriteria yang sudah selesai disematkan kepada sekelompok orang dan menutup kemungkinan adanya reposisi hubungan sosial dengan kelompok-kelompok diluarnya (Budiman,2007 : 10-12).

Berbicara tentang minoritas kita tentu tidak dapat mengabaikan apa yang disebut dengan mayoritas, salah satu faktor dari mayoritas adalah karena jumlah anggota grup yang banyak. Seiring dengan bertambah banyaknya anggota, maka *social influence* group tersebut semakin besar. Kebanyakan kaum minoritas sering mengalami kesulitan atau hambatan saat berhadapan dengan kaum mayoritas. Terdapat dua hal penyebab timbulnya masalah minoritas yang kemudian berkembang menjadi sebuah konflik besar yaitu prasangka dan diskriminasi, yang pertama yaitu prasangka, prasangka dapat diartikan sebagai penghakiman sebelum fakta itu ada. Prasangka biasanya muncul akibat adanya peristiwa yang tidak dapat dilupakan, sehingga prasangka menjadi stereotip yang digunakan untuk menilai semua hal sama dan sejajar. Kedua yaitu diskriminasi, oleh Antonovsky (1960:81), diskriminasi diartikan sebagai tindakan merugikan yang efektif kepada seseorang yang dalam keadaan secara rasional tidak relevan, diskriminasi merupakan perlakuan yang berbeda atau dibedakan dari yang umumnya, dapat dikatakan juga jika diskriminasi adalah tindakan lanjutan setelah munculnya prasangka. Dari prasangka dan diskriminasi inilah muncul rasa ketidakadilan yang menjadi dasar bagi upaya-upaya perlawanan yang dilakukan kaum minoritas (Antonovsky 1960:81 dalam Simpson dan Yinger 1993 : 13).

Will Kymlicka dalam artikelnya *Estonia's Integration Policies In a Comparative Perspective* menyebutkan bahwa “minoritas tidak hanya terjadi dalam sebuah masyarakat kecil pada suatu wilayah tertentu, tetapi juga terdapat dalam skala nasional, minoritas nasional adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah lingkungan masyarakat yang lengkap dan berfungsi dengan baik berdasarkan asal mereka kemudian digabungkan dengan wilayah negara yang lebih besar. Penggabungan kelompok minoritas biasanya bukan bersifat sukarela, tetapi disebabkan kolonisasi, penaklukan atau diserahkan oleh sebuah kekuatan imperialis kepada imperialis yang lain, tetapi dapat juga bersifat sukarela sebagai hasil dari federasi” (Will Kymlicka, [Http://www.ngonet.ee/integration/kymlicka_eng.html](http://www.ngonet.ee/integration/kymlicka_eng.html), diakses pada 9 Oktober 2014 Jam 15.25).

Namun di dalam mayoritas dan minoritas, tidak selalu kaum mayoritas yang memegang pengaruh kuat, kaum minoritas pun dapat berpengaruh meskipun dengan jumlah anggota yang lebih sedikit dibandingkan dengan kaum mayoritas. Kaum minoritas yang mengajukan pendapat yang bertentangan dengan mayoritas cenderung lebih berpengaruh daripada minoritas yang gagal untuk membantah mayoritas.

Gambar. 1.1
Bagan Mayoritas dan Minoritas



- *Mayoritas mutlak* terjadi ketika jumlah anggota kelompok tersebut lebih banyak dan kekuatan kelompok tersebut juga lebih besar.
- *Conversion* terjadi ketika jumlah anggota tersebut lebih sedikit, namun memiliki kekuatan lebih besar. Misalnya para petinggi Negara. Jumlah mereka lebih sedikit daripada jumlah rakyat yang mereka pimpin, namun mereka memiliki kekuatan untuk menjadi kelompok mayoritas yakni dari jabatan yang mereka miliki.
- *Silent majority* terjadi ketika jumlah anggota kelompok lebih banyak, namun kekuatannya tidak besar. Misalnya rakyat, secara kuantitas rakyat berjumlah lebih besar dari petinggi negara, namun berjalannya negara ini tetap berjalan sesuai keputusan dari para petinggi negara. Disini rakyat merupakan kelompok dengan *silent majority*.

- *Minoritas mutlak* terjadi ketika jumlah anggota kelompok lebih sedikit dan kekuatan kelompok ini juga rendah. Jadi kelompok ini sering terpengaruh oleh kelompok lain yang mayoritas.

Mayoritas dan minoritas dapat berdampak negatif bagi masyarakat baik bagi kaum minoritas maupun pada kaum mayoritas itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya perilaku diskriminatif yang muncul karena menganggap kelompok lain sebagai *out-group* yang merupakan lawan bagi mereka terutama bagi kaum minoritas yang dianggap asing oleh kaum mayoritas. Adanya perilaku diskriminatif ini menimbulkan konflik sosial dimana salah satu pihak kelompok merasa dirugikan dan ditindas (Budiman 2007 : 24).

3. Prasangka Sosial

Prasangka sosial merupakan satu bentuk sikap yang secara psikologis menjadi sangat penting dalam hubungan interaksi antar kelompok masyarakat. Interaksi sosial dalam komunitas masyarakat akan sangat rentan bagi munculnya prasangka sosial, yang dapat mengarah pada perilaku-perilaku yang merusak keharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat. Untuk memperjelas pengertian tentang prasangka sosial berikut akan kita paparkan beberapa pengertian yang berkaitan dengan prasangka sosial.

3.1. Pengertian Prasangka Sosial

Prasangka sosial merupakan sikap perasaan orang-orang terhadap golongan manusia tertentu, golongan ras atau kebudayaan, yang berlainan dengan golongan orang yang berprasangka itu, (Gerungan, 1988.). Sementara Feldman

(1985) mendefinisikan prasangka sosial sebagai evaluasi positif atau negatif atau sikap mengadili suatu anggota dari kelompok berdasarkan keanggotaannya pada kelompok tersebut. Mar'at (1981) menguatkan definisi prasangka sebagai dugaan-dugaan yang dapat memiliki nilai negatif maupun positif tetapi dugaan ini lebih bersifat negatif. Hal ini senada dengan pendapat Myers (1996) yang mengemukakan prasangka sebagai sifat negatif seseorang atau kelompok lain atau anggotanya yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan kelompok.

Pendapat lain mengenai prasangka dikemukakan oleh Allport (1954) yang mengemukakan bahwa prasangka adalah sikap antipati yang didasarkan pada generalisasi yang salah dan sifatnya kaku, prasangka ini dapat dirasakan saja atau diekspresikan. Prasangka dapat ditujukan pada suatu kelompok secara keseluruhan atau kepada individu sebagai anggota suatu kelompok (Allport, 1954).

Hudaniah & Dayakisni (2001) memperjelas definisi prasangka sosial sebagai sikap negatif yang tidak dapat dibenarkan terhadap suatu kelompok lain. Prasangka juga melibatkan penilaian apriori terhadap objek sasaran prasangka yang tidak berdasarkan pada karakteristik unik individu, tetapi melekatkan pada karakteristik kelompok yang menonjol. Terdapat proses perkembangan prasangka dalam kehidupan interaksi sosial antar kelompok masyarakat, antara lain :

- a. Menerima pendapat atau informasi tanpa memperhatikan kekuatan atas fakta, dan hanya menyandarkan kebenaran tersebut pada isu yang berkembang atau argumentasi yang menjadi pijakan atas pendapat tersebut.

b. Tindakan atau perilaku yang sangat diyakini tentang sebuah pendapat yang dipegang teguh, padahal pendapatnya tersebut justru tidak rasional.

c. Kebencian, ketidak akrahan, dan ketidak senangan terhadap suatu kelompok khusus, ras, golongan lapisan masyarakat tertentu, atau agama.

Samovar dan Porter (1981), mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap kaku terhadap suatu kelompok orang, berdasarkan keyakinan atau pra-konsepsi yang salah. Artinya bukan berdasar fakta atau bukti ilmiah, yang terlalu disederhanakan dan dilebih-lebihkan. Prasangka sangat mempengaruhi tindakan, bersifat kaku dan irrasional. Individu yang terkena virus prasangka tidak mudah untuk mengubah sikapnya. Bila dihadapkan pada kenyataan yang berbeda, biasanya resistan dan mencari pembenarannya sendiri, atau malah muncul emosinya. Artinya, jika apa yang diprasangkakannya ternyata salah atau tidak sesuai, maka mereka mengambil dalih untuk mempertahankan "kebenaran" prasangkanya.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diperoleh pengertian bahwa prasangka sosial merupakan sikap negatif seseorang terhadap orang lain karena adanya perbedaan dari orang yang bersangkutan dengan orang lain atau kelompok lain. Persepsi yang muncul cenderung diiringi oleh tindakan yang tidak menyenangkan dan dapat merugikan orang atau kelompok lain.

3.2. Aspek-aspek Prasangka Sosial

Berdasarkan teori-teori, sebab-sebab terbentuknya dan faktor-faktor yang mempengaruhi prasangk, dapat dilihat munculnya beberapa aspek yang berpengaruh terhadap prasangka sosial meliputi:

a. Aspek kepribadian yaitu seseorang dengan kepribadian otoriter dan dogmatis dengan ciri-cirinya antara lain berprasangka, bersikap kaku, konvensional dan tidak mempunyai toleransi (dogmatisme), loyalitas tinggi terhadap kelompoknya dan mendukung figur otoritas serta melakukan tindakan agresif.

b. Aspek frustrasi dan *scape goating* yaitu prasangka yang muncul akibat rasa frustrasi seseorang, sehingga membutuhkan pelampiasan sebagai objek atas ketidakmampuannya menghadapi kegagalan. Objek yang dipilih adalah objek yang lemah dan tidak mampu memberikan perlawanan.

c. Aspek konflik yaitu karena adanya kompetisi, yang menunjukkan adanya persaingan antara masing-masing individu maupun kelompok sebagai suatu pemuas kebutuhan. Persaingan yang tidak sehat dan terjadi terus menerus akan menyebabkan timbulnya sentimen negatif. Keadaan ini menyebabkan ketegangan di kedua belah pihak sehingga timbul prasangka sosial yang bisa berakibat perlakuan agresif.

d. Aspek kecemburuan sosial yang ditimbulkan oleh adanya anggapan bahwa salah satu kelompok memiliki status sosial lebih tinggi dibanding kelompok lain, sehingga timbul perlakuan diskriminatif kecemburuan sosial yang muncul adalah akibat perbedaan tingkat sosial ekonomi di dalam kehidupan masyarakat.

e. Aspek norma/*cultural* yaitu prasangka yang timbul karena norma atau budaya kelompok yang mengajarkan individu untuk berprasangka kepada orang atau kelompok lain. Di dalam nilai-nilai tersebut ditransfer pada

stereotip dan prasangka terhadap etnis lain yang oleh individu dimiliki dan dipelihara sebagai bentuk konformitas terhadap kelompoknya

f. Aspek penilaian yang terlalu ekstrim dan terlalu menggeneralisasi yaitu prasangka yang terjadi akibat penilaian individu yang terlalu ekstrim dengan menggeneralisasikan suatu pengalaman yang menyakitkan atau kesan yang tidak menyenangkan terhadap seseorang dari etnis tertentu kepada seluruh anggota dari etnis tersebut.

Gerungan (1988) berpendapat prasangka sosial pada mulanya merupakan cerminan sikap perasaan yang negatif. Perasaan negatif yang berkesinambungan akan mempunyai kecenderungan memunculkan polemik dalam diri. Implementasi dari prasangka yang timbul, memunculkan tindakan-tindakan yang diskriminatif tanpa alasan yang objektif. Tindakan diskriminatif dapat diartikan sebagai tindakan yang dapat menghambat, merugikan dan mengancam kehidupan pribadi orang lain atau kelompok tertentu. Sikap seperti ini dapat menghambat perkembangan seseorang yang berprasangka maupun yang dikenai prasangka tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek prasangka sosial terdiri dari enam buah, yaitu aspek kepribadian, aspek *fmstasi/scapegoatin*, aspek konflik, aspek kecemburuan sosial, aspek etanosentris, aspek norma/kultural, dan aspek penilaian yang terlalu ekstrim.

3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Prasangka Sosial

Dalam proses pembentukan prasangka sosial terdapat faktor-faktor yang berkaitan dan saling berinteraksi satu sama lain. Menurut beberapa ahli ada faktor-faktor mendasar yang berkaitan dengan prasangka sosial beserta definisi

nya. Menurut Ahmadi (1990), seseorang tidak semata-mata melakukan atau mempunyai prasangka sosial tetapi ada faktor-faktor yang mendahuluinya sehingga seseorang berprasangka. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berprasangka adalah:

- a. Orang berprasangka dalam rangka mencari kambing hitam. Dalam berusaha seseorang mempunyai kelemahan atau mengalami kegagalan. Sebab dalam kegagalan itu tidak dicari dalam dirinya tapi pada orang lain.
- b. Orang mempunyai prasangka karena memang sudah terkondisi atau sudah mempersiapkannya.

Prasangka timbul karena adanya anggapan yang sudah menjadi pendapat umum atau kebiasaan dalam lingkungan tertentu. Kimball Young (dalam Ahmadi, 1990) menyatakan bahwa prasangka mempunyai ciri khas pertentangan dalam kelompok yang ditandai oleh kuatnya *in-group* dan *out-group*. Penyebab prasangka adalah sebagai berikut:

- a. *Individual differences*, yaitu perbedaan faktor kepribadian seseorang. Seseorang berprasangka karena mempunyai kepribadian yang otoriter. Salah satu ciri kepribadian otoriter dengan adanya prasangka terhadap orang yang berbeda dengan dirinya.
- b. *Setting stage*, yaitu seseorang berprasangka karena adanya tahapan-tahapan tertentu, di mana setiap tahapan berbeda tujuan dan tugasnya sehingga seseorang berprasangka. Hal ini dijelaskan karena seseorang di dalam kelompok mempunyai *superordinate goals* yaitu tujuan-tujuan tertentu yang hanya dapat dicapai hanya dengan kerja sama antar sesama

anggota kelompok. Mereka berprasangka terhadap orang-orang yang ada di luar kelompoknya.

c. *Real conflict*, yaitu orang yang berprasangka karena adanya kompetisi langsung untuk mendapatkan sesuatu yang terbatas. Dalam hal ini pihak yang kalah akan merasa frustrasi.

d. *Social jealousy*, yaitu adanya anggapan kelompok tertentu merasa lebih miskin dibanding kelompok lain, serta ada perasaan tidak puas terhadap kelompok atau orang yang lebih kaya.

e. *Social identity*, yaitu usaha seseorang untuk meningkatkan harga dirinya dengan mengidentifikasikan dirinya kepada kelompok tertentu. Hal ini menganggap kelompoknya adalah kelompok *favorit* sehingga individu diluar kelompoknya dianggap lebih rendah dibanding dirinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis deskriptif kualitatif, karena metode ini dapat menggambarkan, menjelaskan, dan membangun hubungan dari data-data yang ditemukan secara mendalam pada satu objek. Penelitian kualitatif merupakan sebuah bentuk pendekatan interpretif di mana peneliti membuat sebuah interpretasi dari apa yang dilihat, didengar, dan dipahami, serta interpretasi peneliti tidak bisa dipisahkan dari latarbelakang, sejarah, konteks, dan pemahaman sebelumnya (Creswell, 2009: 176). Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan suatu cara untuk penggalan dan pemahaman makna individu atau kelompok yang berasal dari suatu permasalahan

manusia dan sosial, di mana proses penelitiannya terkait dengan pemunculan pertanyaan dan prosedur, data yang di peroleh dari suatu keadaan partisipan tertentu, membangun analisis data secara induktif dari tema-tema yang khusus menuju sesuatu yang bersifat umum, dan peneliti membuat intepretasi makna yang berasal dari data yang diperoleh (Creswell, 2009: 4).

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley (1997 : 23) disebut *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah suku Papua beserta kehidupan sosial mereka di dusun Tambakbayan IX, Babarsari Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data secara menyeluruh dan integratif yang terkait dengan tujuan penelitian, setidaknya peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data penelitian deskriptif kualitatif ini yaitu melakukan wawancara mendalam, observasi dan studi pustaka.

3.1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Pada teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan bertatap muka dengan informan secara intensif dengan menggunakan pedoman wawancara guna mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.

3.2. Observasi

Observasi yang dilakukan dengan mengamati secara langsung tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti tujuannya adalah untuk melihat interaksi langsung yang terjadi dan mengetahui fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara.

3.3. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

4. Waktu dan Tempat Penelitian

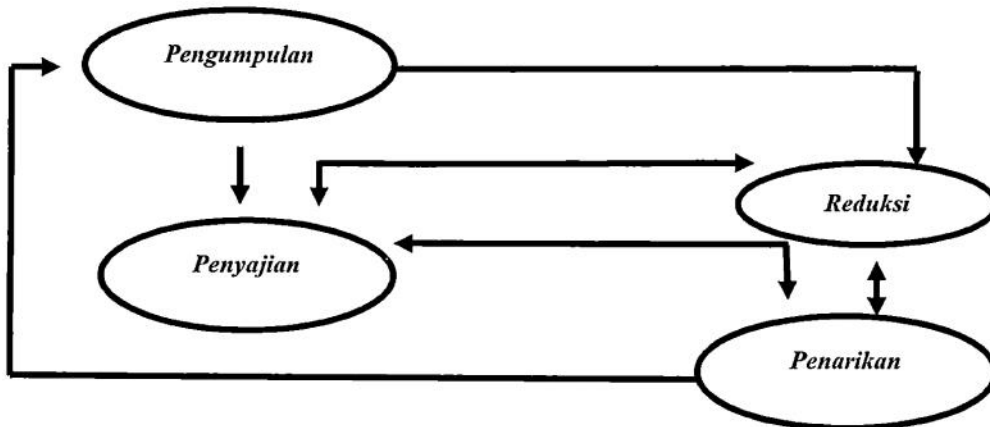
Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu dua minggu Di daerah Tambakbayan IX, Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5. Teknik Analisis data

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2006:81). Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif seperti pada gambar berikut :

Gambar.1.2

Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman 1992 : 20

5.1. Reduksi Data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, dimana setelah peneliti memperoleh data harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

5.2. Display (Penyajian Data)

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas bentuk yang lebih utuh. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dalam menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

5.3. Verifikasi (Penerikan Kesimpulan)

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Kesimpulan selama penelitian serta makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan penyajian dari hasil analisis data dan memudahkan proses analisis penelitian. Untuk itu, tulisan ini akan disusun secara sistematis yang terdiri dari empat bab.

Bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan metodologi penelitian. Bab ini disajikan sebagai sebuah pendahuluan dan pengantar isi dari pembahasan penelitian pada bab-bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian. Profil informan, serta penelitian terdahulu, Bab ini berisi keadaan masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki oleh suku Papua sebagai objek penelitian yang akan menggambarkan gambaran mengenai objek penelitian dan memberikan informasi yang mendukung tentang objek penelitian. Selain itu akan dituliskan beberapa penelitian terdahulu.

Bab ketiga berisi tentang hasil temuan penelitian, serta analisis penelitian, dan bab keempat akan berisi tentang kesimpulan penelitian dan juga saran untuk penelitian kedepannya, serta kekurangan yang ada didalam penelitian ini.